

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

SISTEM INFORMASI PELAPORAN KEGIATAN BIDKUM (SIPAKUM) GUNA MENINGKATKAN KINERJA SATKER BIDKUM POLDA SUMATERA UTARA



Oleh:

NAMA : ARISTO BASTIAN SIANIPAR, S.E., M.Ak
NOSIS : 20220307021204

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN V T.A. 2022

LEMBAR PERSETUJUAN

RENCANA AKSI PERUBAHAN

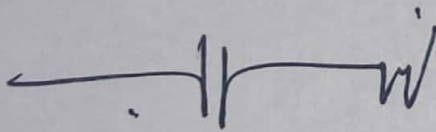
**SISTEM INFORMASI PELAPORAN KEGIATAN BIDKUM
(SIPAKUM) GUNA MENINGKATKAN KINERJA SATKER BIDKUM
POLDA SUMATERA UTARA**

Peserta pelatihan:

ARISTO BASTIAN SIANIPAR, S.E., M.Ak
NOSIS: 20220307021204

Telah disetujui pada tanggal, April 2022
Di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

COACH,



Dr. HANJAYA FATAH, M.MPd
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70110336

MENTOR,



ZULKIFLI, S.H., M.H.
PEMBINA NIP 196712172002121004

PENJELASAN MENTOR
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

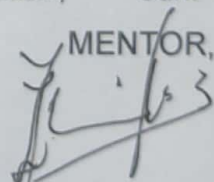
Nama Peserta Pelatihan : ARISTO BASTIAN SIANIPAR, S.E., M.Ak
Nosis : 20220307021204

Saya menilai peserta Sangat Mampu / ~~Mampu~~ / ~~Kurang Mampu~~ / ~~Tidak Mampu~~
melaksanakan Laporan aksi perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut :

Peserta PKA sangat mampu membuat dan
melaksanakan Laporan aksi perubahan.
Hasil implementasi aplikasi SIPADUM sangat
bermanfaat guna meningkatkan kinerja antara
Bidang Polder Sumut dan menjadi salah satu
Indikator menuju Zona Integritas pada Bidang
Polder Sumut.

Medan, Juni 2022

MENTOR,



ZULKIFLI, S.H., M.H.

PEMBINA NIP 196712172002121004

PENJELASAN COACH
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta Pelatihan : ARISTO BASTIAN SIANIPAR, S.E., M.Ak
Nosis : 20220307021204

Saya menilai peserta Sangat Mampu / Mampu / Kurang Mampu / Tidak Mampu melaksanakan Perencanaan aksi perubahan, dengan Penjelasan sebagai berikut:

- Permodalan dan managemen daya kelas
- Tujuan dan manfaat daya kelas
- Stakeholder yang terlibat kelas
- Tatapon kegiatan daya kelas
- biaya untuk & semirar kal

Bandung, April 2022

COACH,

Dr. HANJAYA FATAH, M.MPd.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70110336

ABSTRAKSI

SISTEM INFORMASI PELAPORAN KEGIATAN BIDKUM (SIPAKUM) GUNA MENINGKATKAN KINERJA SATKER BIDKUM POLDA SUMATERA UTARA

OLEH:

ARISTO BASTIAN SIANIPAR, S.E., M.Ak

Pemanfaatan teknologi informasi sangat bermanfaat dalam perkembangan era industry 4.0 pada seluruh instansi pemerintahan guna menunjang pelayanan maupun peningkatan kinerja. Sistem informasi pada Bidkum Polda Sumut yang bersifat konvensional sekarang ini tidak mendukung dalam peningkatan kinerja maupun sistem pelayanan publik. Oleh karena itu dalam mendukung transparansi pelayanan publik dan peningkatan kinerja dibutuhkan suatu sistem informasi yang berbasis online guna meningkat pelayanan publik dan peningkatan kinerja. Tujuan dalam pembuatan aplikasi ini untuk mendukung program pemerintah dalam menciptakan transparansi informasi dan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja setiap instansi pemerintah. Metode dalam pembuatan aplikasi ini dengan membuat sistem informasi yang berbasis online dalam bentuk aplikasi SIPAKUM (Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Bidkum) agar dapat dilihat oleh masyarakat setiap aksi atau kegiatan yang dilaksanakan oleh satker Bidkum Polda Sumatera Utara. Pembuatan aplikasi ini akan menciptakan informasi yang efektif dan efisien sehingga sistem pelaporan dapat tercipta secara sistematis dan terstruktur. Pemberitaan setiap kegiatan melalui aplikasi SIPAKUM pada Bidkum Polda Sumut akan dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi informasi yang akuntabel. Oleh karena itu pembuatan sistem informasi yang berbasis website/blogspot berupa aplikasi SIPAKUM ini sangat bermanfaat dalam menunjang transparansi informasi sehingga menciptakan pelayanan publik dan peningkatan kinerja Satker Bidkum Polda Sumatera Utara.,

Kata Kunci : Sistem Informasi, Peningkatan Kinerja.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih yang telah memberikan rahmat, anugerah serta karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Aksi Perubahan dengan judul “***Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Bidkum (SIPAKUM) Guna Meningkatkan Kinerja Satker Bidkum Polda Sumatera Utara***”. Penyusunan Laporan Aksi Perubahan ini telah dilakukan tepat pada waktunya melalui tahapan-tahapan pembimbingan baik kepada *coach* maupun mentor dengan tidak menemui rintangan yang berarti.

Penulisan Laporan Aksi Perubahan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu baik dalam masa penyusunan maupun selama proses penulisan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Kombes Pol ANDRY SETIAWAN, S.I.K., M.H. Kepala Bidang Hukum Polda Sumut selaku Sponsor yang memberikan dukungan penuh atas pembuatan aplikasi SIPAKUM;
2. Pembina ZULKIFLI, S.H., M.H, Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Sumut selaku Mentor yang memberikan motivasi dan dukungan penuh atas pembuatan aplikasi SIPAKUM;
3. AKBP Dr HANJAYA FATAH, M.MPd yang telah berupaya memberikan dukungan serta motivasi dalam pelaksanaan aksi perubahan peserta Pendidikan Kepemimpinan Administrator angkatan V TA. 2022 selaku coach;
4. AKBP Ramles Napitupuu, S.H., M.H, Kasubbankum Bidkum Polda Sumut selaku Stakeholder;
5. Seluruh Komandan, senior dan rekan-rekan personel Bidang Hukum Polda Sumatera Utara yang memberikan dukungan penuh dan bantuan atas pelaksanaan laporan aksi perubahan.
6. Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri Gedebage Bandung Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan kepada saya

untuk mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Administrator angkatan V TA. 2022;

7. Bapak dan Ibu para Panitia dan Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri yang telah memberikan pengetahuan dan berbagi pengalaman kepada penulis;
8. Orangtua saya yang dengan doanya, senantiasa selalu menemani dan menyemangati.
9. Istri dan anak-anak tercinta, yang selalu memberi semangat dan kegembiraan tiada henti dalam proses pelaksanaan kegiatan selama off campus.
10. Seluruh rekan-rekan peserta PKA Angkatan V dan VI Tahun 2022 Pusdikmin Lemdiklat Polri yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam pembuatan laporan aksi perubahan

Medan, Juni 2022

ACTION LEADER,



ARISTO BASTIAN SIANIPAR, S.E., M.Ak.
NOSIS. 20220307021204

DAFTAR ISI

Lembar persetujuan	
Lembar penjelasan coach	
Lembar penjelasan mentor	
Abstraksi	
Kata pengantar	
Daftar isi	
Daftar Tabel.....	
Bab I	Pendahuluan..... 1
	A. Latar belakang 1
	1. Deskripsi umum..... 1
	2. Tujuan6
	3. Manfaat6
	B. Inovasi dan Output Aksi Perubahan7
	C. Ruang lingkup.....7
Bab II	Deskripsi Rencana Aksi Perubahan8
	A. Roadmap atau <i>Milestone</i> proyek perubahan.....8
	1. Kegiatan8
	2. Waktu pelaksanaan 10
	3. Tahapan rencana aksi perubahan 11
	B. Stakeholder aksi perubahan 14
	1. Internal 15
	2. Eksternal 15
	3. Peran, pengaruh dan intensitas 16
	C. Strategi komunikasi.....21
Bab III	Pelaksanaan Aksi perubahan.....22
	A. Pemanfaatan sumber daya22
	1. Mobilisasi SDM.....22
	2. Pengelolaan anggaran.....24
	3. Pengelolaan sarana dan prasarana24
	4. Strategi mengatasi masalah24
	B. <i>Stakeholder</i>26
	1. Dukungan <i>stakeholder</i>26
	2. Kuadran stakeholder setelah aksi perubahan32

C. Capaian aksi perubahan	34
1. Kesesuaian antara <i>milestone</i> dan implementasi	34
2. Pencapaian hasil aksi perubahan	38
Bab IV Penutup	48
A. Kesimpulan	48
B. Rekomendasi	49

Lampiran-lampiran

- A. Berita acara penyerahan aksi perubahan
- B. Pernyataan/ dukungan stakeholder
- C. Output yang dihasilkan
- D. Laporan mingguan dan harian / log activity
- E. Rencana aksi perubahan yang disetujui mentor dan coach
- F. Video aksi perubahan max 10 menit
- G. Bahan tayang

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data personel Bidkum Polda Sumut.....	4
Tabel 1.2.	Prioritas Isu Strategis berdasarkan kriteria USG.	4
Tabel 2.1	Waktu Pelaksanaan	11
Tabel 2.2	Tahapan Aksi Perubahan	11
Tabel 2.3	Tabel Peran, pengaruh dan intensitas.....	16
Tabel 3.1	Realisasi Anggaran Biaya.....	24
Tabel 3.2	Dukungan stakeholder setelah adanya aksi perubahan	27
Tabel 3.3	Kesesuaian antara <i>Milestone</i> dan <i>Impelemetasi</i>	34
Tabel 3.4	Capaian hasil aksi perubahan.....	38
Tabel 3.5	Capaian aksi perubahan sebelum dan sesudah terbentuknya inovasi SIPAKUM	40
Tabel 3.6	Bentuk capaian aksi perubahan sebelum dan sesudah terbentuknya inovasi SIPAKUM	41
Tabel 3.7	Data hasil jawaban kuesioner Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan (SIPAKUM)	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan struktur organisasi Bidkum Polda Sumut.	1
Gambar 1.2. Indikator Pelayanan Publik.....	3
Gambar 2.1. Kuadran Stakeholder	19
Gambar 2.2. Peta Jejaring (Net Map).	20
Gambar 3.1. Peta upaya mobilisasi SDM.....	23
Gambar 3.2. Kudran Stakeholder setelah aksi perubahan.....	32
Gambar 3.3. Inovasi pada Indikator Tata Laksana Zona Integritas Bidkum Polda Sumut	43
Gambar 3.4. Kuesioner aplikasi SIPAKUM.....	44
Gambar 3.5. Diagram hasil Kuisisioner	46

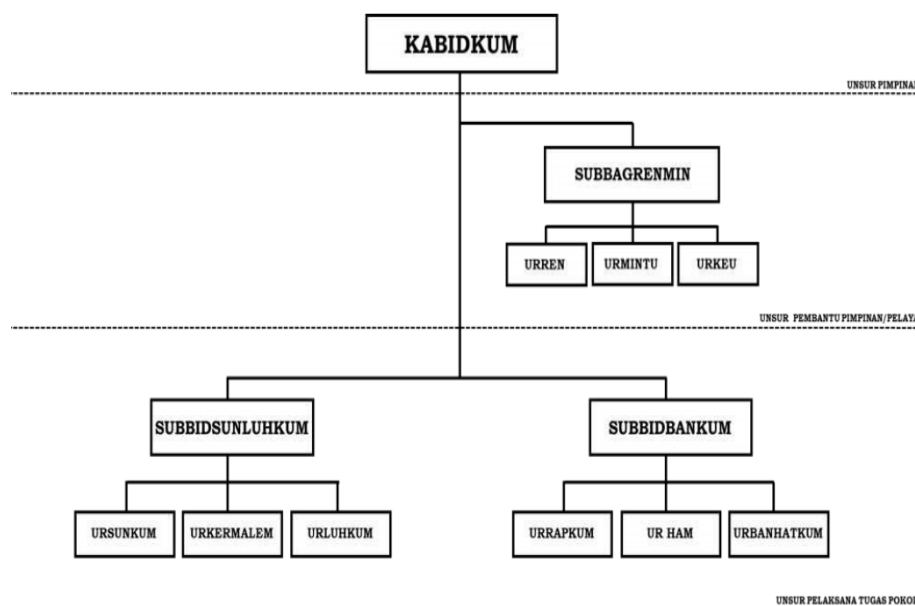
BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang.

1. Deskripsi Umum.

Berdasarkan pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Bidang Hukum Polda Sumatera Utara adalah Satuan Kerja unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang hukum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Satuan kerja Bidkum Polda Daerah Sumatera Utara bertugas menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM meliputi bantuan dan nasihat hukum, penyuluhan hukum, pembentukan peraturan Kepolisian serta penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bidkum Polda Sumatera Utara.

Gambar 1.1 Bagan Struktur organisasi Bidkum Polda Sumut



Adapun tugas action leader melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, masyarakat, dan satuan fungsi di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dimana administrator bertanggung jawab langsung kepada Kasubbidsunluhkum dengan melaporkan segala kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan hukum di lingkungan Polda Sumatera Utara.

Salah satu program Kapolri melalui Keputusan Kapolri Nomor 265 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dimana pembentukan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang diberikan kepada Satker pada Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun program yang diberikan untuk menuju wilayah bebas korupsi (WBK) adalah salah satunya adanya penataan tatalaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK. Target yang ingin dicapai pada program salah satunya ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Polri dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK).

Berdasarkan hasil koordinasi dan informasi yang diperoleh bahwa Bidkum Polda Sumatera Utara terkait dengan penataan tatalaksana belum menggunakan teknologi informasi secara efektif dan efisien dan prosedur kerja yang jelas pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK), sehingga capaian untuk menuju zona integritas yang wilayah bebas korupsi (WBK) belum terlaksana dengan baik, sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu penggunaan teknologi informasi secara efektif, efisien dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Hal tersebut dapat dilihat sesuai dengan gambar dibawah:

Gambar 1.2 Indikator pelayanan publik

3. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?

A B C

Catatan

Dokumen Pendukung

Informasi Tambahan

a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi;

b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat;

c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi.

Catatan Revisi

EVALUATOR at 15/12/2021 08:49 :
Belum terlampir:
1. Screenshot inovasi

untuk mendapatkan nilai A, maka harus melampirkan inovasi.
Mohon lampirkan semua dokumen bukti dukung yang sesuai dengan petunjuk teknis di pedoman LKE.

EVALUATOR at 23/06/2021 10:58 :

2 dari 8

Berkaitan dengan hal tersebut diatas adapun yang menyebabkan tidak adanya pemanfaatan teknologi informasi secara efisien dan efektif dalam proses peningkatan kinerja disebabkan kurang pahamnya personel dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada, dimana personel pada Bidkum Polda Sumatera Utara tidak memahami kondisi dan situasi kerja yang sekarang ini sudah berbasis teknologi dan informasi dalam pelayanan publik untuk peningkatan kinerja satker Bidkum Polda Sumatera Utara. Dimana personel Bidkum Polda Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas terkait dengan sistem pelaporan harian masih bersifat konvensional dan tidak tersistem dengan baik. Sehingga dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja pada satker Bidkum Polda Sumatera Utara kurang maksimal.

Salah satu permasalahan yang ada pada satker Bidkum Polda Sumatera Utara dalam peningkatan kinerja adalah kurangnya personel pada satker Bidkum Polda Sumatera Utara yang juga mempengaruhi kinerja Bidkum Polda Sumut. Hal ini sesuai dengan data riil personel yang ada tidak sesuai dengan DSP yang telah ditetapkan, sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Data personel Bidkum Polda Sumut

NO	JABATAN	DSP	RIIL	KET
1	Kabidkum	1	1	
2	Subbagrenmin	18	10	
3	Subbidsunluhkum	10	5	
4	Subbidbankum	10	12	
JUMLAH		39	28	

Berdasarkan pada isu-isu tersebut di atas, action leader mencoba memilih satu isu yang dianggap serius untuk segera diatasi, dengan melakukan pembobotan menggunakan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth). Pemakaian USG ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan jika hal tersebut tidak diatasi yang diberi nilai pembobotan 1–4. Dengan total skor tertinggi yang menjadi skala prioritas.

Tabel 1.2. Prioritas Isu Strategis berdasarkan kriteria USG

NO	PERMASALAHAN	NILAI			TOTAL	URUT
		U	S	G		
1	Belum adanya Sistem Informasi pelaporan kegiatan pada Bidkum Polda Sumatera Utara guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik	4	4	4	12	I
2	Kurang pahamnya personel pada Bidkum Polda Sumatera Utara dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pembuatan pelaporan kegiatan Bidkum Polda Sumatera Utara	4	3	3	10	II

N O	PERMASALAHAN	NILAI			TOTAL	URUT
		U	S	G		
3	Masih kurangnya personel pada Bidkum Polda Sumut dalam pelaksanaan tugas sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak maksimal	3	3	3	9	III

Keterangan:

U = *Urgency* (urgensi), yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan.

S = *Seriousness* (tingkat keseriusan dari masalah), yaitu dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak

G = *Growth* (tingkat perkembangan masalah), yaitu apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah.

Skala Likert	
1	Tidak penting
2	Kurang penting
3	Cukup penting
4	Sangat penting

Berdasarkan hasil isu strategis yang timbul, dapat disimpulkan melalui metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), bahwa isu strategis yang menjadi masalah pada Bidkum Polda Sumut “Belum adanya Sistem Informasi pelaporan kegiatan pada Bidkum Polda Sumatera Utara guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, hal ini akan menimbulkan kurang maksimalnya sistem pelayanan publik dan peningkatan kinerja Bidkum Polda Sumut dalam mendukung zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang berbasis teknologi informasi.

Dari permasalahan yang didapat melalui hasil USG maka action leader mengambil judul “Sistem Informasi Pelaporan

Kegiatan Bidkum (SIPAKUM) Guna Meningkatkan Kinerja Satker Bidkum Polda Sumatera Utara”.

2. Tujuan.

Tujuan pembuatan laporan aksi perubahan yang dicapai terbagi menjadi 2 (dua) tahap, sebagai berikut :

a. Tahap *Off Campuss* :

- 1) Terwujudnya peningkatan kinerja yang efektif dan efisien pada Bidkum Polda Sumatera Utara Bidkum Polda Sumut melalui sistem informasi yang berbasis website/blogspot yaitu aplikasi SIPAKUM.
- 2) Tersedianya sistem informasi pelaksanaan pelaporan kegiatan secara efektif dan efisien pada satker Bidkum Polda Sumatera Utara.

b. Tahap pasca pelatihan :

Terwujudnya sistem informasi pelaporan kegiatan yang berbasis website di seluruh satuan wilayah Polda Sumatera utara.

2. Manfaat.

Manfaat yang didapatkan Aksi Perubahan ini adalah :

a. Manfaat bagi pihak Internal (personil dan organisasi).

- 1) Meningkatkan kinerja Bidkum Polda Sumatera Utara;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem pelaporan Bidkum Polda Sumatera Utara;
- 3) Terselenggaraya informasi secara efektif dan efisien pada Bidkum Polda Sumatera Utara;
- 4) Memudahkan dan memperlancar untuk memperoleh informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan pada Bidkum Polda Sumatera Utara.

- b. Manfaat bagi pihak Eksternal (*Stakeholder*).
 - 1) Sebagai bahan informasi yang efektif dan efisien sehingga dapat menjadi informasi secara terbuka dan transparan bagi publik;
 - 2) Mempermudah sistem pelaporan kegiatan untuk meningkatkan capaian kinerja bagi organisasi yang transparan guna menciptakan pelayanan publik.

B. Inovasi dan Output Aksi Perubahan.

1. Inovasi.

Adapun solusi dari permasalahan yang telah diuraikan di atas maka *action leader* berencana membuat suatu inovasi dengan membuat suatu sistem informasi pelaporan kegiatan Bidkum guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumatera Utara yang berbasis web/blogspot untuk meningkatkan kinerja satker Bidkum Polda Sumut secara efektif dan efisien menuju zona integritas yang wilayah bebas korupsi (WBK).

2. Output Aksi Perubahan.

Adapun output dari aksi perubahan yang dibuat adalah :

- 1) Terciptanya sistem informasi yang berbasis web/blogspot yakni aplikasi SIPAKUM (Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Bidkum);
- 2) Terwujudnya buku pedoman pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Bidkum Polda Sumut (SIPAKUM).

C Ruang Lingkup.

Adapun ruang lingkup dari aksi perubahan yang dibuat adalah pembuatan aplikasi sistem informasi pelaporan kegiatan Bidkum (SIPAKUM) guna meningkatkan kinerja satker Bidkum Polda Sumatera Utara

BAB II

DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN

A *Roadmap / Milestone Aksi Perubahan.*

1. Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan aksi perubahan secara garis besar terbagi dalam beberapa kegiatan utama dengan mengidentifikasi tahapan berdasarkan konsep manajerial POAC yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan) dan *Controlling* (evaluasi), dengan kegiatan sebagai berikut :

a. *Planning* (perencanaan).

Action leader mengawali kegiatan proses pelaksanaan aksi perubahan yang dimulai:

- 1) Melakukan pelaporan kepada pimpinan satuan kerja, yaitu Kabidkum Polda Sumut selaku Sponsor dan Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Sumut selaku Mentor;
- 2) Memberikan penjelasan terkait rencana aksi perubahan yang akan dibuat oleh action leader guna meningkatkan kinerja pada organisasi;
- 3) Memberikan gambaran kepada Sponsor maupun Mentor terkait inovasi yang akan dibuat oleh action leader dan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh action leader;
- 4) Melakukan koordinasi kepada para stakeholder internal maupun eksternal dengan memberikan penjelasan terkait aksi perubahan yang akan dibuat oleh action leader dan permintaan dukungan guna mewujudkan pelaksanaan aksi perubahan yang akan dibuat oleh action leader.

b. *Organizing* (pengorganisasian):

Tahap pengorganisasian ini *Action Leader* memastikan adanya pembagian penugasan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Pembentukan Tim Efektif guna mewujudkan aksi perubahan yang telah ditetapkan dengan menerbitkan surat perintah;
- 2) Melakukan rapat koordinasi dengan Tim Efektif yang bertujuan untuk mengetahui aksi perubahan yang akan dibuat dan melakukan pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi perubahan guna mewujudkan terlaksananya seluruh kegiatan yang telah ditentukan.

c. *Actuating* (Pelaksanaan):

Tahap pelaksanaan ini *action leader* mengarahkan seluruh sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan terlaksananya aksi perubahan antara lain:

- 1) Memerintahkan Tim Efektif untuk menyiapkan bahan-bahan maupun data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi SIPAKUM;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Tim IT dalam pembuatan rancangan aplikasi SIPAKUM sekaligus pembuatan buku pedoman tata cara pengoperasian aplikasi SIPAKUM;
- 3) Penerbitan Keputusan Kasatker terkait penggunaan aplikasi SIPAKUM sebagai dasar legalitas implementasi aplikasi SIPAKUM;
- 4) Pengesahan buku pedoman pengoperasian aplikasi SIPAKUM oleh Kasatker selaku Sponsor;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi aplikasi SIPAKUM kepada seluruh personel Bidkum Polda Sumut.

d. *Controlling* (Monitoring dan evaluasi):

Tahap ini *Action Leader* memastikan bahwa seluruh kegiatan aksi perubahan telah sesuai dengan rencana antara lain:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi perubahan yang dibuat mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan dengan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi;
- 2) Melakukan pengecekan pada setiap tahap-tahap pelaksanaan kegiatan rencana aksi perubahan apakah sudah terlaksana sesuai yang telah ditentukan sebelumnya;
- 3) Melakukan perbaikan-perbaikan administrasi terhadap kegiatan aksi perubahan serta melengkapi seluruh berkas-berkas administrasi dalam proses penyusunan laporan aksi perubahan;
- 4) Melakukan penyusunan dan pembuatan laporan aksi perubahan;
- 5) Pengusulan laporan pelaksanaan aksi perubahan untuk disetujui oleh Mentor dan Coach.

2. Waktu Pelaksanaan.

Waktu pelaksanaan aksi perubahan disusun sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan aksi perubahan, sesuai tabel di bawah yaitu:

Tabel 2.1 Waktu Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Minggu Ke-									Pasca Pelatihan
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
1	<i>Planning</i> (perencanaan)										
2	<i>Organizing</i> (pengorganisasian)										
3	<i>Actuating</i> (pelaksanaan)										
4	<i>Controlling</i> (evaluasi)										
5	Laporan Aksi Perubahan										

3. Tahapan Aksi Perubahan.

Milestone merupakan suatu management tools yang sangat berguna dalam perencanaan, skedul, dan pelaporan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan. Adapun *Milestone* Aksi Perubahan Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Bidkum (SIPAKUM) guna Meningkatkan Kinerja Satker Bidkum Polda Sumatera Utara, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Tahapan aksi perubahan

No	Tahapan Kegiatan	Waktu	Evidence
A	TAHAP OFF CAMPUS		
1.	Tahap Perencanaan		
	a. Melaporkan dan menjelaskan hasil sidang rencana aksi perubahan kepada Sponsor	13 s/d 15 April 2022	Dokumentasi Kegiatan Action Leader dengan Mentor dan Stakeholfer
	b. Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi kepada Mentor terkait rencana aksi perubahan		
	c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Stakeholder internal maupun eksternal		

No	Tahapan Kegiatan	Waktu	Evidence
2.	Tahap Pengorganisasian		
	a. Koordinasi dengan mentor untuk penunjukan Tim Efektif	18 s/d 20 April 2022	Sprin Tim Efektif, Dokumentasi giat Action Leader dengan Tim Efektif
	b. Penyusunan dan penerbitan Surat Perintah Pembentukan Tim Efektif		
	c. Melaksanakan rapat dengan Tim Efektif terkait pembagian Tugas		
3.	Tahap Pelaksanaan		
	a. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses pembuatan desain aplikasi SIPAKUM	21 April s/d 6 Mei 2022	Dokumen SIPAKUM; Dokumentasi giat; Aplikasi SIPAKUM; Buku Pedoman SIPAKUM
	b. Menyusun Desain untuk proses pembuatan aplikasi SIPAKUM		
	c. Proses Pembuatan rancangan aplikasi SIPAKUM		
	d. Uji coba rancangan aplikasi SIPAKUM		
	e. Evaluasi hasil rancangan aplikasi SIPAKUM		
	f. Finishing aplikasi SIPAKUM		
	g. Konsep dan Penyusunan Buku Petunjuk aplikasi SIPAKUM		
	h. Konsep dan penyusunan kata sambutan Kabidkum Polda Sumut pada manual book dan Keputusan Kabidkum tentang penerapan aplikasi SIPAKUM		
	i. Pengajuan konsep sambutan dan draf manual book dan Keputusan Kabidkum tentang penerapan aplikasi SIPAKUM kepada Kabidkum selaku		

No	Tahapan Kegiatan	Waktu	Evidence
	sponsor untuk ditandatangani		
	j. Penggandaan Buku Petunjuk aplikasi SIPAKUM		
Implementasi Aplikasi SIPAKUM			
	a. Konsep Nota dinas sosialisasi aplikasi SIPAKUM.	9 s/d 13 Mei 2022	Dokumen data dukung Implementasi SIPAKUM; Dokumentasi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis; Rapat Evaluasi
	b. Distribusi surat sosialisasi dan persiapan ruang rapat		
	c. Sosialisasi Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Bidkum (SIPAKUM)		
	d. Bimbingan teknis dan mengimplementasikan penggunaan aplikasi pada masing-masing operator		
	e. Implementasi aplikasi SIPAKUM	16 s/d 27 Mei 2022	
	f. Evaluasi implementasi SIPAKUM		
4. Monitoring dan Evaluasi			
	a. Menyusun kuesioner untuk mengetahui tingkat ketercapaian implementasi SIPAKUM	30 Mei s/d 10 Juni 2022	Kuesioner SIPAKUM; Dokumentasi giat; Laporan aksi perubahan; Persetujuan LAP oleh mentor
	b. Pembagian Pengisian kuesioner oleh responden untuk mengetahui tingkat ketercapaian implementasi SIPAKUM		
	c. Mengolah hasil kuesioner tingkat ketercapaian implementasi SIPAKUM		
	d. Masa waktu perbaikan atas saran dan masukan Quisioner.		
	e. Melakukan konsultasi dengan Coach terkait Draft Laporan		

No	Tahapan Kegiatan	Waktu	Evidence
	Aksi Perubahan (LAP).		
	f. Melakukan konsultasi dengan Atasan langsung terkait Finalisasi Draft Laporan Aksi Perubahan (LAP)		
	g. Menyusun Laporan Aksi Perubahan (LAP)		
	h. Persetujuan Pelaksanaan Laporan Aksi Perubahan oleh Mentor		
B.	Tahap Pasca Pelatihan	Dilaksanakan selesai pelatihan sampai satu tahun yang akan datang	
	Melakukan pengembangan terhadap aplikasi SIPAKUM agar lebih menjangkau seluruh wilayah Poldas Sumatera Utara		

Waktu Pelaksanaan Aksi Perubahan yang berjudul **Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Bidkum (SIPAKUM) Guna Meningkatkan Kinerja Satker Bidkum Poldas Sumatera Utara** mulai tanggal 13 April s/d 12 Juni 2022.

B. Stakeholder Aksi Perubahan.

Stakeholder merupakan seluruh pihak-pihak yang terkait baik individu maupun kelompok yang memiliki hubungan dan kepentingan dalam organisasi terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Kehadiran *stakeholder* ini sangat diperlukan untuk memberikan bantuan guna pencapaian tujuan dalam aksi perubahan. *Stakeholder* yang terlibat dalam aksi perubahan ini terbagi menjadi internal dan eksternal.

1. Stakeholder Internal.

Stakeholder internal adalah stakeholder yang berasal dari dalam satuan kerja diantaranya :

- a) Kabidkum Polda Sumatera Utara berperan sebagai Sponsor pada aksi perubahan yang memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan aksi perubahan;
- b) Kasubidsunluhkum Bidkum Polda Sumut sebagai atasan langsung sekaligus sebagai Mentor yang memberikan dukungan penuh dan arahan serta bimbingan dalam pelaksanaan aksi perubahan;
- c) Kaurkermalem Subbidsunluhkum Bidkum Polda Sumut memberikan saran masukan dan memberikan informasi kegiatan pada unit kerja;
- d) Koursunkum Subbidsunluhkum Bidkum Polda Sumut memberikan saran masukan dan memberikan informasi kegiatan pada unit kerja;
- e) Paursunkum Subbidsunluhkum Bidkum Polda Sumut memberikan saran masukan dan memberikan informasi kegiatan pada unit kerja.

2. Stakeholder Eksternal.

Stakeholder eksternal adalah stakeholder yang berasal dari luar unit kerja Subbidsunliuhkum Bidkum Polda Sumut yang mempunyai kepentingan dan peran, serta pengaruh terhadap pelaksanaan dan manfaat dari aksi perubahan.

- a) Kepala Subbidang Bantuan Hukum (Kasubbidbankum) Bidkum Polda Sumatera Utara berperan memberikan dukungan, arahan dan persetujuan terhadap rencana aksi perubahan;
- b) Kaur Rapkum Subbidbankum Bidkum Poda Sumatera Utara sebagai pemberi informasi dan pelaporan kegiatan pada unit kerja;
- c) Kaur HAM Subbidbankum Bidkum Poda Sumatera Utara sebagai pemberi informasi dan pelaporan kegiatan pada unit kerja;

- d) Kaur Urbanhatkum Subbidbankum sebagai pemberi informasi dan pelaporan kegiatan pada unit kerja;
- e) Paur Rapkum Subbidbankum Polda Sumut sebagai pemberi informasi dan pelaporan kegiatan pada unit kerja;
- f) Paur HAM Subbidbankum Polda Sumut sebagai pemberi informasi dan pelaporan kegiatan pada unit kerja;
- g) Kasubbagrenmin Bidkum Polda Sumatera Utara sebagai pemberi informasi dan pelaporan kegiatan pada unit kerja;
- h) Advokat Bidkum Polda Sumut Bidkum Poda Sumatera Utara sebagai pemberi informasi dan pelaporan kegiatan pada unit kerja.
- i) Kaurren Subbagrenmin Bidkum Polda Sumut sebagai pemberi informasi dan pelaporan kegiatan pada unit kerja;
- j) Kaurkeu Bidkum Polda Sumut sebagai pemberi informasi kegiatan pada unit kerja;
- k) Pamin Subbagrenmin Polda Sumut sebagai pemberi informasi dan pelaporan kegiatan pada unit kerja.

3. Peran, pengaruh dan intensitas

Untuk mengetahui keterlibatan stakeholder internal maupun eksternal dalam aksi perubahan sistem informasi pelaporan kegiatan (SIPAKUM) ini dapat digambarkan melalui tabel dan gambar dibawah ini:

Tabel 2.3. Tabel Peran, pengaruh dan intensitas

N O	STAKEHOLDER	POSISI	PENGARUH	NILAI
I.	INTERNAL			
1.	Kabidkum Polda Sumut Peran: Memberikan dukungan, arahan dan persetujuan terhadap rencana aksi perubahan	Promoter	Sangat Tinggi	9 +++
2	Kasubbid Sunluhkum Peran: Memberikan dukungan,	Promoter	Sangat Tinggi	9 +++

NO	STAKEHOLDER	POSISI	PENGARUH	NILAI
	arahan dan persetujuan terhadap rencana aksi perubahan			
3	Kaurkermalem Subbidsunluhkum Peran: Memberikan dukungan, arahan dan persetujuan terhadap rencana aksi perubahan	Defender	Tinggi	7 ++
4	Kaursunkum Subbidsunluhkum Peran: Memberikan dukungan, arahan dan persetujuan terhadap rencana aksi perubahan	Defender	Tinggi	7 ++
5	Paursunkum Subbidsunluhkum Peran: Memberikan dukungan, arahan dan persetujuan terhadap rencana aksi perubahan	Defender	Tinggi	7 ++
II.	EKSTERNAL			
1.	Kasubbid Bankum Peran: Memberikan dukungan, arahan dan persetujuan terhadap rencana aksi perubahan	Laten	Tinggi	7 ++
2	Kaurapkum Subbidbankum Peran: Memberikan dukungan, arahan dan persetujuan terhadap rencana aksi perubahan	Laten	Tinggi	7 ++
3	Kaur HAM Subbidbankum Peran: Memberikan dukungan, arahan dan persetujuan terhadap rencana aksi perubahan	Laten	Tinggi	7 ++
4	Kaur Urbanhatkum Subbidbankum Peran: Memberikan dukungan, arahan dan persetujuan terhadap rencana aksi perubahan	Laten	Tinggi	7 ++
5	Paur Rapkum Subbidbankum Polda Sumut Peran: Memberikan dukungan, arahan dan persetujuan terhadap rencana aksi perubahan	Laten	Tinggi	7 ++
6	Paur HAM Subbidbankum Peran: Memberikan dukungan,	Laten	Tinggi	7

NO	STAKEHOLDER	POSISI	PENGARUH	NILAI
	arahan dan persetujuan terhadap rencana aksi perubahan			++
7	Kasubbagrenmin Bidkum Peran: Memberikan dukungan, arahan dan persetujuan terhadap rencana aksi perubahan	Latent	Tinggi	7 ++
8	Advokat Bidkum Polda Sumut Peran: Memberikan dukungan, arahan dan persetujuan terhadap rencana aksi perubahan	Latent	Tinggi	7 ++
9	Kaurren Subbagrenmin Peran: Tidak memiliki kewenangan dan kurang memiliki kepentingan terhadap aksi perubahan	Apathetic	Rendah	2 ++
10	Kaurkeu Peran: Tidak memiliki kewenangan dan kurang memiliki kepentingan terhadap aksi perubahan	Apathetic	Rendah	2 ++
11	Pamin Subbagrenmin Peran: Tidak memiliki kewenangan dan kurang memiliki kepentingan terhadap aksi perubahan	Apathetic	Rendah	2 ++

Keterangan:

Jenis Posisi.

Sangat mendukung	= +++
Mendukung	= ++
Netral	= +
Menentang	= -

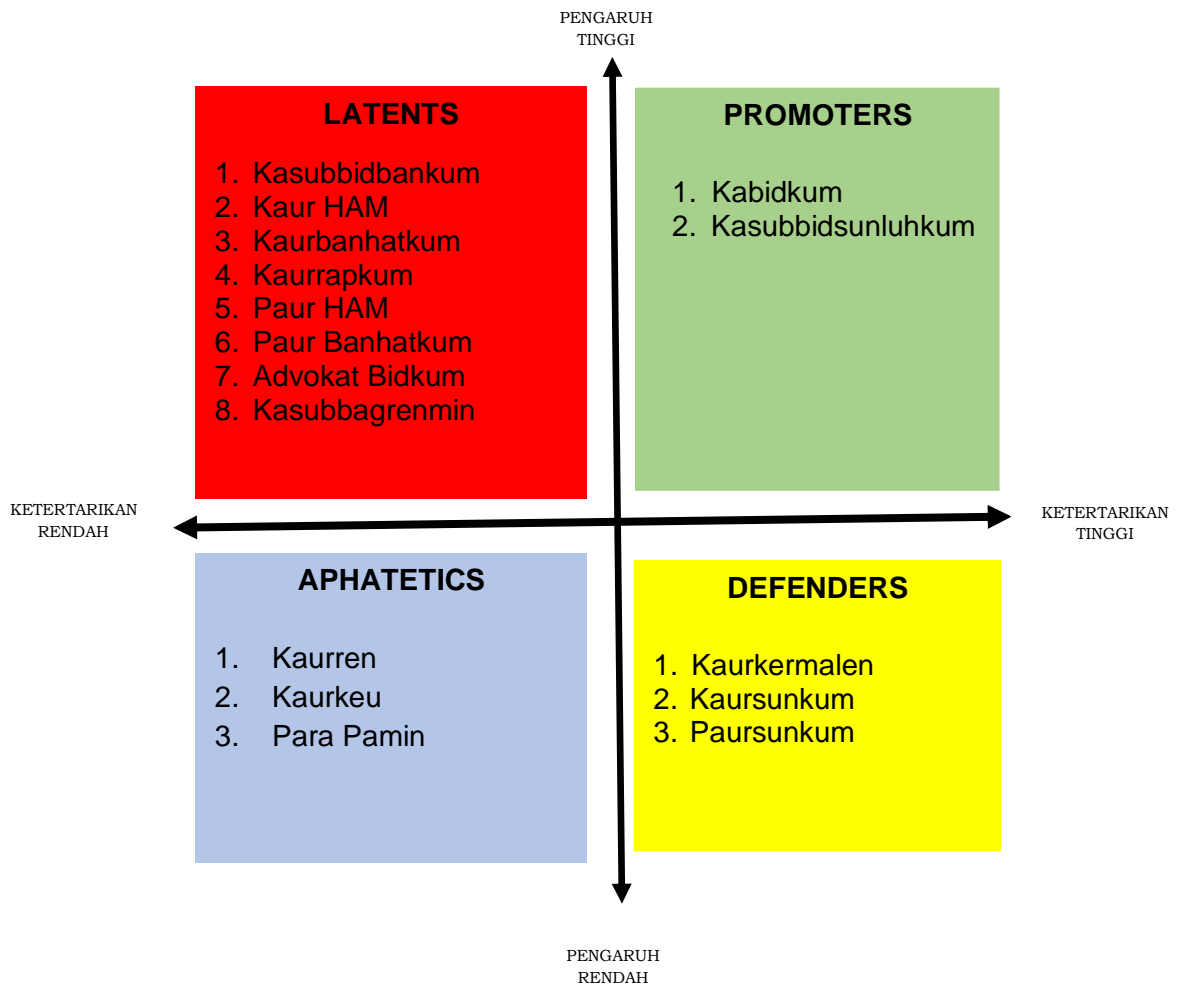
Pengaruh.

Sangat Tinggi	= 9
Tinggi	= 6 – 8
Sedang	= 3 – 5
Rendah	= 1 – 2

Promoter	= Pengaruh tinggi kepentingan tinggi.
Defenders	= Pengaruh rendah kepentingan tinggi.
Latent	= Pengaruh tinggi kepentingan rendah.
Apathetic	= Pengaruh rendah kepentingan rendah

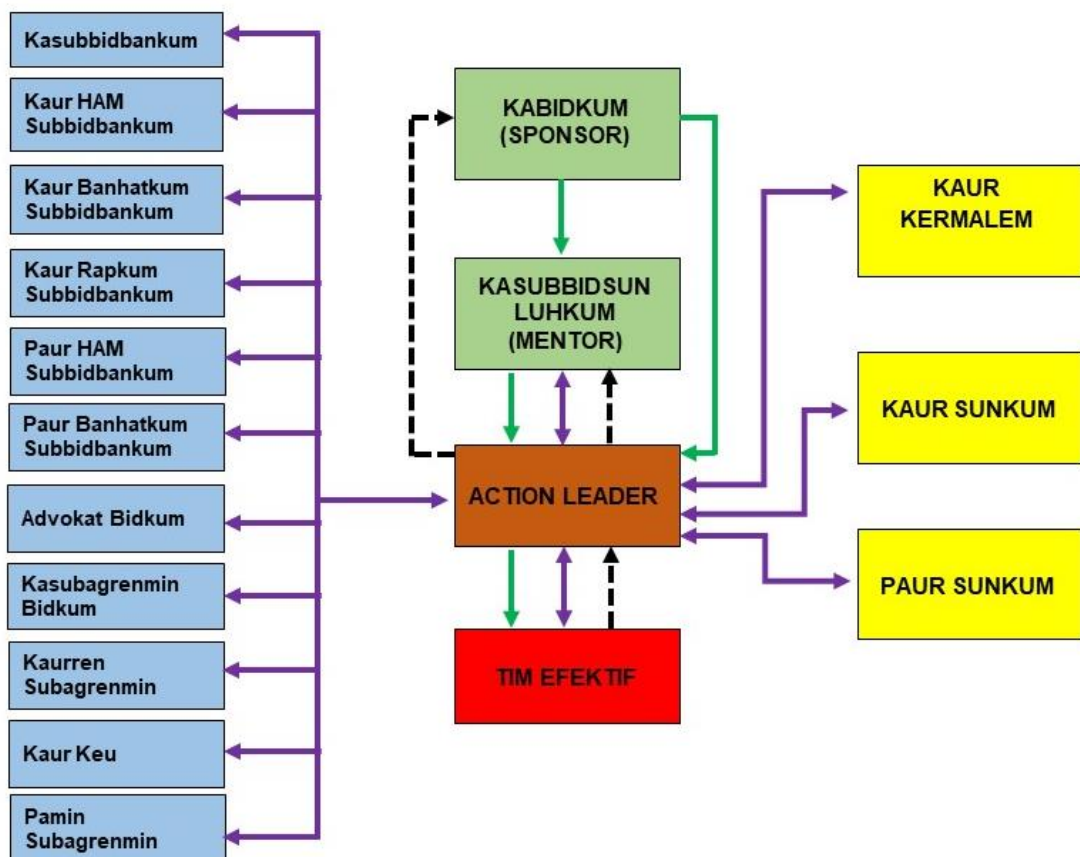
Gambar di bawah menjelaskan keterlibatan stakeholder internal maupun eksternal dalam aksi perubahan, mana yang tergolong *promoter, defender, latent* dan *apathetic*

Gambar 2.1 Kuadran Stakeholder



Peta jejaring (*Net Map*) di bawah ini meguraikan hubungan antar komponen/unsur dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan, yaitu hubungan yang bersifat kordinasi, perintah, laporan, konsolidasi, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2. Peta Jejaring (*Net Map*)



Keterangan:

↔	Koordinasi
→	Perintah
- - ->	Laporan

C Strategi Komunikasi.

Strategi komunikasi yang digunakan action leader dalam memperoleh dukungan dari seluruh stakeholder atas aksi perubahan ini adalah dengan metode:

1. Strategi Komunikasi *Deskriptif*.

Action Leader mendeskripsikan/menjelaskan perihal pengertian, mekanisme, manfaat serta tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Bidkum (SIPAKUM) guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut sehingga para stakeholder dapat mendukung dan menerima manfaat dari pembuatan aplikasi SIPAKUM.

2. Strategi Komunikasi *Persuasif*.

Action Leader berupaya mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku *stakeholder* sehingga dapat mendukung penuh atas aksi perubahan yang dibuat oleh action leader. Sehingga para stakeholder dapat bertindak sesuai dengan yang diharapkan, yakni memiliki pemahaman positif terhadap pentingnya Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Bidkum (SIPAKUM) guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut.

3. Strategi Komunikasi *Edukatif*.

Action Leader berupaya untuk memberikan pemahaman secara teknis implementasi Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Bidkum (SIPAKUM), sehingga para stakeholder dapat memahami sistem tata kerja dari aplikasi SIPAKUM yang sangat bermanfaat bagi organisasi guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

BAB III

PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

A Pemanfaatan Sumber Daya.

Action Leader dalam pelaksanaan aksi perubahan ini melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan aksi perubahan dengan tepat waktu. Untuk melaksanakan aksi perubahan agar terlaksana dengan baik, maka *Action Leader* melakukan mobilisasi sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan strategi masalah yang digunakan dengan jbaran yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mobilisasi Sumber Daya Manusia.

Mobilisasi Sumber Daya Manusia merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya dengan mengidentifikasi sumber daya manusia (keahlian, pengetahuan dan konsep/pikiran) untuk pengembangan, pelaksanaan dan berkelanjutan aktivitas untuk pencapaian tujuan aksi perubahan.

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam aksi perubahan ini terbagi menjadi:

a. SDM Internal:

Yaitu Mentor, *Coach*, *Action Leader*, Tim Efektif dan *Stakeholder internal* (Kaur Kermalem, Kaursumkum dan Paursumkum)

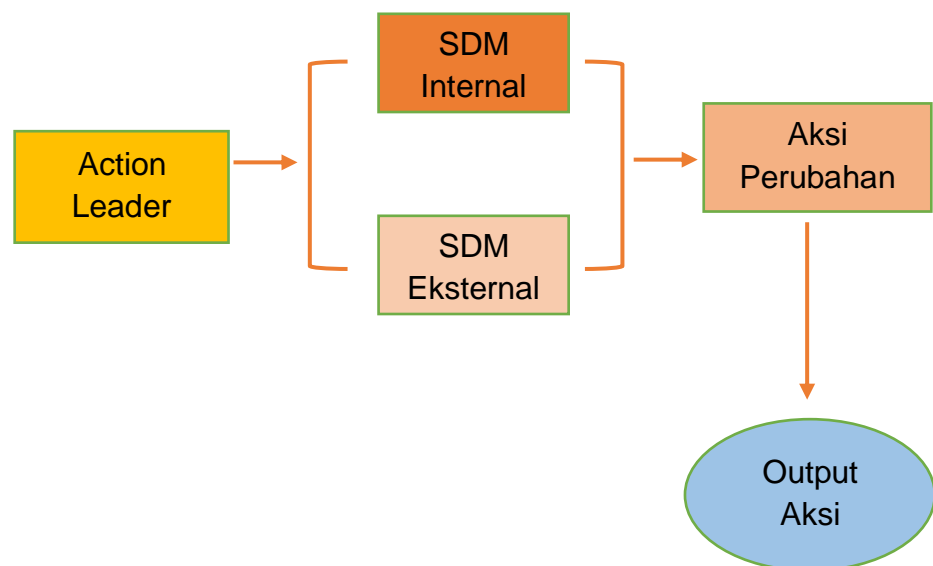
b. SDM Eksternal yaitu:

- 1) Kasubbid Bankum Polda Sumut;
- 2) Kaurapkum Subbidbankum Polda Sumut;
- 3) Kaur HAM Subbidbankum Polda Sumut;
- 4) Kaur Urbanhatkum Subbidbankum Polda Sumut;
- 5) Paur Rapkum Subbidbankum Polda Sumut;
- 6) Paur HAM Subbidbankum Polda Sumut;
- 7) Kasubbagrenmin Bidkum Polda Sumut;

- 8) Advokat Bidkum Polda Sumut;
- 9) Kaurren Subbagrenmin Bidkum Polda Sumut;
- 10) Kaurkeu Subbagrenmin Bidkum Polda Sumut;
- 11) Pamin Subbagrenmin Bidkum Polda Sumut.

Action Leader harus mampu mengendalikan, mempengaruhi dan meyakinkan SDM Internal dan Eksternal agar tujuan/output dari aksi perubahan tercapai. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh *action leader* untuk mendapat dukungan dan kerjasama dari para stakeholder untuk kelancaran pencapaian tujuan aksi perubahan dengan melakukan strategi komunikasi deskriptif, komunikasi persuasif dan komunikasi edukatif. Tujuan utama dalam tahap Mobilisasi SDM ini yaitu mendapat dukungan dari stakeholder internal dan eksternal untuk mencapai tujuan dari aksi perubahan. Dalam aksi perubahan pengorganisasian SDM yang digunakan dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 3.1. Peta upaya mobilisasi SDM.



2. Pengelolaan Anggaran.

Biaya pelaksanaan aksi perubahan ini tidak didukung oleh anggaran dalam DIPA Bidkum Polda Sumut, *action leader* akan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar aksi perubahan tetap dapat dilaksanakan baik dan menggunakan anggaran yang bersifat swadaya guna mencapai tujuan aksi perubahan yang telah ditetapkan. Adapun realisasi anggaran dalam pelaksanaan aksi perubahan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Biaya.

No	Uraian Pengeluaran	Jumlah	Ket
1	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi	1.200.000	
2	Pembuatan sistem berbasis web dan Buku Panduan	2.500.000	
3	Penggandaan Buku Panduan	300.000	
JUMLAH		4.000.000	

3. Pengelolaan Sarana Prasarana.

Sarana prasarana yang digunakan dalam mewujudkan aksi perubahan ini antara lain yaitu laptop/komputer, *printer*, alat tulis kantor termasuk perangkat sosialisasi seperti ruang rapat, infokus. Seluruh sarana dan prasarana ini akan disediakan dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kerja Satuan kerja Bidang Hukum Polda Sumatera Utara.

4. Strategi Mengatasi Masalah.

Dalam proses pelaksanaan aksi perubahan masih terdapat beberapa permasalahan yang tidak terlalu signifikan. Adapun strategi yang dilakukan oleh *action leader* dalam mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan.

- 1) Seringnya para *stakeholder* tidak ada ditempat berhubung melaksanakan tupoksi sehingga mengalami kendala dalam melaksanakan aksi perubahan.
- 2) Pemahaman personel subbagrenmin terhadap pengoperasian aplikasi SIPAKUM masih minim.
- 3) Pembiayaan pembuatan aplikasi serta biaya konsumsi selama pelaksanaan rapat-rapat dan selama pelaksanaan implementasi tidak didukung oleh anggaran.
- 4) Tim efektif tidak dapat bekerja secara maksimal disebabkan adanya rutinitas tupoksi masing-masing personel.

b. Strategi mengatasi permasalahan.

- 1) *Action leader* melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik kepada para *stakeholder* dengan menjelaskan bahwa aksi perubahan ini memiliki batas waktu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan, agar dapat menyesuaikan waktu antara tupoksi dengan jadwal pelaksanaan aksi perubahan agar dapat terlaksana dengan baik.
- 2) *Action leader* melakukan bimbingan teknis secara rutin kepada personel subbagrenmin terkait penggunaan aplikasi SIPAKUM agar dapat paham dan mengerti dalam pengoperasian dan pelaporan kegiatan Bidkum Polda Sumut.
- 3) *Action leader* melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik kepada Sponsor maupun mentor agar dapat memberikan bantuan dukungan anggaran dalam membantu action leader dalam melaksanakan aksi perubahan sehingga tujuan/output dapat tercapai

dengan baik dan memanfaatkan anggaran yang dimiliki untuk digunakan secara efektif dan efisien.

- 4) *Action leader* melakukan komunikasi dan pendekatan yang baik dengan Tim efektif dengan membuat jadwal pembagian waktu terkait dengan pelaksanaan tupoksi dengan aksi perubahan agar tujuan/output yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

B. Stakeholder

Para *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan aksi perubahan memiliki perannya masing-masing dalam implementasi pelaporan pada aplikasi SIPAKUM pada Bidkum Polda Sumatera Utara. Peran *Stakeholder internal* maupun eksternal sangat membantu dan mendukung dalam setiap aksi perubahan. Setelah terlaksananya sosialisasi dan implementasi aplikasi SIPAKUM para stakeholder internal dan eksternal sangat mendukung penuh terwujudnya aplikasi SIPAKUM guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pada satker Bidkum Polda Sumatera Utara sehingga berdampak adanya perubahan posisi pada *stakeholder*

1. Dukungan Stakeholder.

Dukungan dari para *Stakeholder* ini akan menjadi tolak ukur dalam pencapaian seluruh rangkaian aksi perubahan agar dapat terlaksana dengan baik secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun perubahan kelompok dukungan dari para stakeholder setelah adanya sosialisasi dan implementasi dalam pelaksanaan aksi perubahan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.2. Dukungan stakeholder setelah adanya aksi perubahan

NO	STAKEHOLDER	SEBELUM AKSI PERUBAHAN		SESUDAH AKSI PERUBAHAN	
		POSISI	PENGARUH / NILAI	POSISI	PENGARUH / NILAI
I.	INTERNAL				
1.	Kabidkum Polda Sumut Peran: Memberikan dukungan penuh, arahan dan persetujuan terhadap aksi perubahan	Promoter	Sangat Tinggi 9 +++	Promoter	Sangat Tinggi 9 +++
2	Kasubbid Sunluhkum Peran: Memberikan dukungan penuh, arahan saran/masukan dan persetujuan terhadap setiap aksi perubahan	Promoter	Sangat Tinggi 9 +++	Promoter	Sangat Tinggi 9 +++
3	Kaurkermalem Subbidsunluhkum Peran: Memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut.	Defender	Tinggi 7 ++	Latent	Tinggi 8 +++
4	Koursunkum Subbidsunluhkum Peran: Memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut.	Defender	Tinggi 7 ++	Latent	Tinggi 8 +++

NO	STAKEHOLDER	SEBELUM AKSI PERUBAHAN		SESUDAH AKSI PERUBAHAN	
		POSISI	PENGARUH / NILAI	POSISI	PENGARUH / NILAI
5	Paursunkum Subbidsunluhkum Peran: Memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut.	Defender	Tinggi 7 ++	Latent	Tinggi 8 +++
II.	EKSTERNAL				
1.	Kasubbid Bankum Peran: Memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut.	Laten	Tinggi 7 ++	Promoter	Sangat Tinggi 9 +++
2	Kaurapkum Subbidbankum Peran: Memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut.	Laten	Tinggi 7 ++	Promoter	Sangat Tinggi 9 +++
3	Kaur HAM Subbidbankum Peran: Memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap	Laten	Tinggi 7 ++	Promoter	Sangat Tinggi 9 +++

NO	STAKEHOLDER	SEBELUM AKSI PERUBAHAN		SESUDAH AKSI PERUBAHAN	
		POSISI	PENGARUH / NILAI	POSISI	PENGARUH / NILAI
	kegiatan guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut.				
4	Kaur Urbanhatkum Subbidbankum Peran: Memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut.	Laten	Tinggi 7 ++	Promoter	Sangat Tinggi 9 +++
5	Paur Rapkum Subbidbankum Polda Sumut Peran: Memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut.	Laten	Tinggi 7 ++	Promoter	Sangat Tinggi 9 +++
6	Paur HAM Subbidbankum Peran: Memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut.	Laten	Tinggi 7 ++	Promoter	Sangat Tinggi 9 +++
7	Kasubbagrenmin Bidkum Peran: Memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan	Laten	Tinggi 7 ++	Promoter	Sangat Tinggi 9 +++

NO	STAKEHOLDER	SEBELUM AKSI PERUBAHAN		SESUDAH AKSI PERUBAHAN	
		POSISI	PENGARUH / NILAI	POSISI	PENGARUH / NILAI
	bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut.				
8	Advokat Bidkum Polda Sumut Peran: Memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut.	Laten	Tinggi 7 ++	Promoter	Sangat Tinggi 9 +++
9	Kaurren Subbagrenmin Peran: Memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut.	Apathetic	Rendah 2 ++	Defender	Tinggi 7 ++
10	Kaurkeu Peran: Memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut.	Apathetic	Rendah 2 ++	Defender	Tinggi 7 ++
11	Pamin Subbagrenmin Peran: Memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan dan	Apathetic	Rendah 2 ++	Defender	Tinggi 7 ++

NO	STAKEHOLDER	SEBELUM AKSI PERUBAHAN		SESUDAH AKSI PERUBAHAN	
		POSISI	PENGARUH / NILAI	POSISI	PENGARUH / NILAI
	bersedia membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum Polda Sumut.				

Keterangan:

Jenis Posisi.

Sangat mendukung	= +++
Mendukung	= ++
Netral	= +
Menentang	= -

Pengaruh.

Sangat Tinggi	= 9
Tinggi	= 6 – 8
Sedang	= 3 – 5
Rendah	= 1 – 2

Promoter	= Pengaruh tinggi kepentingan tinggi
Defenders	= Pengaruh rendah kepentingan tinggi
Latent	= Pengaruh tinggi kepentingan rendah
Apathetic	= Pengaruh rendah kepentingan rendah

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa adanya perubahan dukungan posisi *stakeholder* internal maupun eksternal disebabkan oleh adanya inovasi yang dibuat oleh action leader yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kinerja satker Bidkum Polda Sumut. *Action leader* melakukan strategi berupa pendekatan maupun komonukasi yang bersifat deskriptif, persuasif dan edukatif dengan memberikan penjelasan bahwa aksi perubahan yang dibuat berupa aplikasi berbasis web/blogspot sangat berguna bagi peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

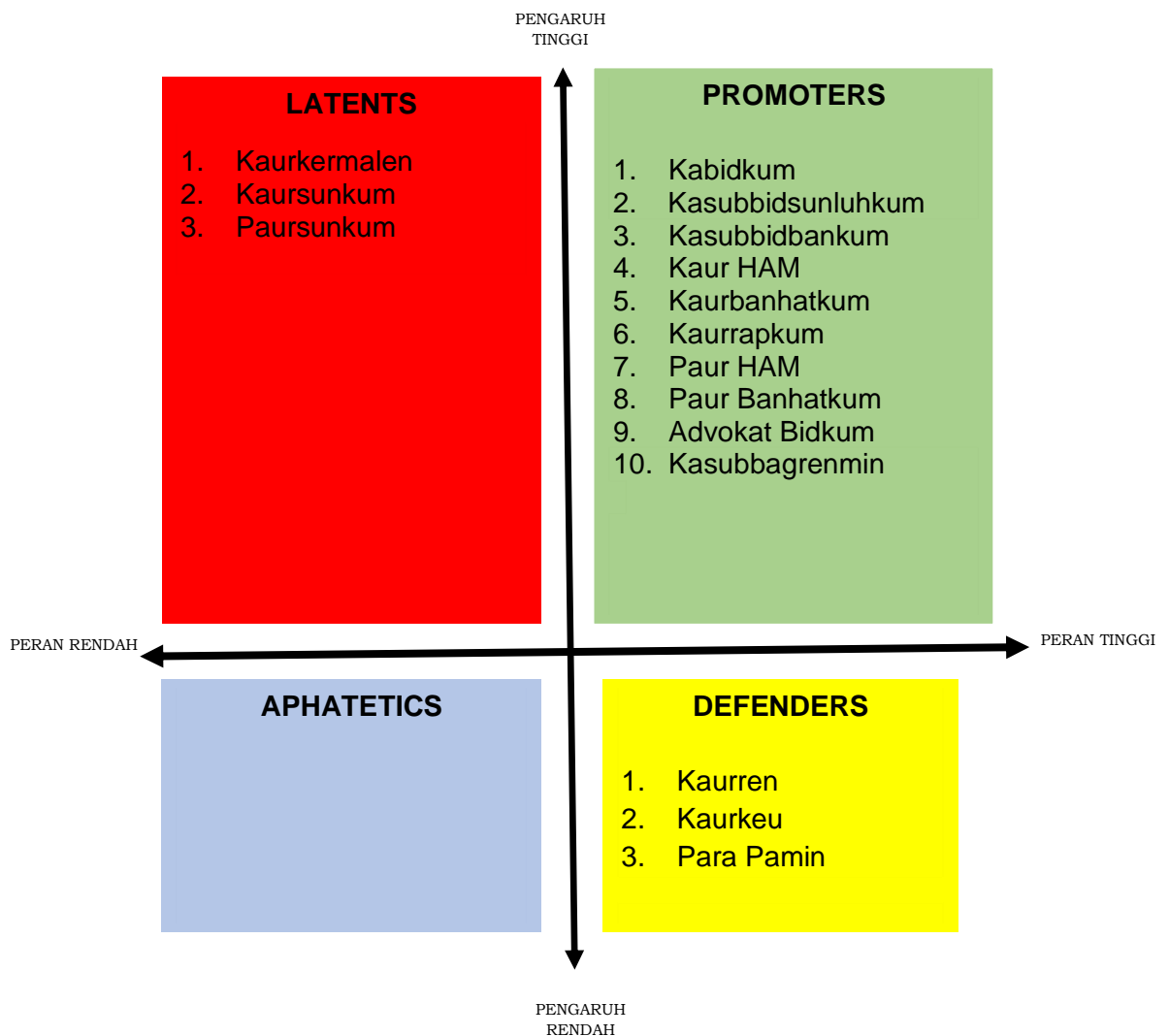
Dimana setiap kegiatan pada Bidkum Polda Sumut dapat dilihat secara keseluruhan sehingga menciptakan keterbukaan informasi. Hal ini juga menjadi salah satu indikator dalam tata laksana berupa pemanfaatan teknologi informasi untuk pencapaian satker Bidkum Polda Sumut menuju zona integritas yang wilayah bebas korupsi (WBK). Dengan penjelasan tersebut

para stakeholder dapat terpengaruh dan sangat mendukung penuh dan membantu aksi perubahan yang dibuat oleh *action leader*.

2. Kuadran stakeholder setelah aksi perubahan

Adanya perubahan posisi pada kuadran stakeholder setelah terlaksananya implementasi aplikasi SIPAKUM pada Bidkum Polda Sumut, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.2. Kudran Stakeholder setelah aksi perubahan.



Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan posisi *kuadran stakeholder*, hal ini disebabkan setelah terlaksananya aksi perubahan berupa implementasi aplikasi SIPAKUM sehingga terjadi pergeseran kelompok latents menuju kelompok promoters. Hal ini *action leader* betul-betul meyakinkan para *stakeholder* bahwa mereka ini mempunyai kepentingan/peran serta pengaruh yang kuat terhadap program untuk membuat berhasil ataupun sebaliknya. Adapun pergeseran kelompok kuadran stakeholder dari Latents menuju Promoters adalah sebagai berikut:

- a. Kasubbidbankum
- b. Kaur HAM
- c. Kaurbanhatkum
- d. Kaurrapkum
- e. Paur HAM
- f. Paur Banhatkum
- g. Advokat Bidkum
- h. Kasubbagrenmin

Pada kelompok *defenders* terjadi pergeseran menuju kelompok *latents* pada kuadran *stakeholder*. *Latents* yaitu kelompok yang memiliki kepentingan/peran cukup besar dalam menyuarakan dukungan terhadap aksi perubahan, tetapi pengaruhnya besar untuk mempengaruhi kegiatan. Hal ini merupakan bentuk memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan yang dibuat oleh *action leader*. Adapun pergeseran kelompok *defenders* menuju kelompok *Latents* dalam kuadran stakeholder adalah:

- a. Kaurkermalem
- b. Koursunkum
- c. Poursunkum

Pada kelompok *aphatetics* terjadi pergeseran menuju kelompok *defenders* pada kuadaran *stakeholder*. *Defenders* yaitu kelompok yang memiliki kepentingan/peran yang besar dalam menyuarakan dukungan terhadap aksi perubahan, akan tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan. Hal ini merupakan bentuk memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan yang dibuat oleh *action leader*, dimana yang tidak memiliki kepentingan/peran khusus maupun pengaruh dalam program kegiatan aksi perubahan, menjadi tertarik. Adapun Pergeseran kelompok *aphatetics* menuju kelompok *defenders* dalam kuadran stakeholder adalah:

- a. Kaurren
- b. Kaurkeu
- c. Para Pamin

3. Capaian Aksi Perubahan.

a. Kesesuaian antara *milestone* dan *Implementasi*.

Hasil capaian seluruh aski perubahan Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Bidkum (SIPAKUM) pada Bidkum Polda Sumut sudah terlasana dengan baik dan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kesesuaian antara *milestone* dengan pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan pada Bidkum Polda Sumut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3. Kesesuaian antara *Milestone* dan *Impelemetasi*

Tahapan Kegiatan	Milestone	Implementasi	Ket
A. TAHAP OFF CAMPUS			
1. Tahap Perencanaan			
a. Menghadap Kabidkum selaku Sponsor dan menjelaskan Rencana Aksi Perubahan yang akan dibuat	13 April 2022	13 April 2022	Terlak sana

Tahapan Kegiatan	Milestone	Implementasi	Ket
b. Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi kepada Mentor terkait rencana aksi perubahan			
c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Stakeholder internal maupun eksternal	14 April 2022	14 April 2022	Terlak sana
2. Tahap Pengorganisasian			
a. Koordinasi dengan mentor untuk penunjukan Tim Efektif			
b. Penyusunan dan penerbitan Surat Perintah Pembentukan Tim Efektif	18 April 2022	18 April 2022	Terlak sana
c. Melaksanakan rapat dengan Tim Efektif terkait pembagian Tugas	19 April 2022	19 April 2022	Terlak sana
3. Tahap Pelaksanaan			
a. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses pembuatan desain aplikasi SIPAKUM	20 April 2022	20 April 2022	Terlak sana
b. Menyusun Desain untuk proses pembuatan aplikasi SIPAKUM	21 April 2022	21 April 2022	Terlak sana
c. Proses Pembuatan rancangan aplikasi SIPAKUM	22 s/d 28 April 2022	22 s/d 28 April 2022	Terlak sana
d. Uji coba rancangan aplikasi SIPAKUM	28 April 2022	28 April 2022	Terlak sana
e. Evaluasi hasil rancangan aplikasi SIPAKUM	28 April 2022	28 April 2022	Terlak sana
f. Finishing aplikasi SIPAKUM	28 April 2022	28 April 2022	Terlak sana
g. Konsep dan Penyusunan Buku Petunjuk aplikasi SIPAKUM	28 April 2022	28 April 2022	Terlak sana

Tahapan Kegiatan	Milestone	Implementasi	Ket
h. Konsep dan penyusunan kata sambutan Kabidkum Polda Sumut pada manual book dan Keputusan Kabidkum tentang penerapan aplikasi SIPAKUM	9 Mei 2022	9 Mei 2022	Terlak sana
i. Pengajuan konsep sambutan dan draf manual book dan Keputusan Kabidkum tentang penerapan aplikasi SIPAKUM kepada Kabidkum selaku sponsor untuk ditandatangani			
j. Penggandaan Buku Petunjuk aplikasi SIPAKUM	9 Mei 2022	9 Mei 2022	Terlak sana
Implementasi Aplikasi SIPAKUM			
a. Konsep Nota dinas sosialisasi aplikasi SIPAKUM.	10 Mei 2022	10 Mei 2022	Terlak sana
b. Distribusi surat sosilisasi dan persiapan ruang rapat			
c. Sosialisasi Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Bidkum (SIPAKUM)	11 Mei 2022	11 Mei 2022	Terlak sana
d. Bimbingan tekhnis dan mengimplementasikan penggunaan aplikasi pada masing-masing operator	12 Mei 2022	12 Mei 2022	Terlak sana
e. Implementasi aplikasi SIPAKUM	13 s/d 25 Mei 2022	13 s/d 25 Mei 2022	Terlak sana
f. Evaluasi implementasi SIPAKUM	27 Mei 2022	27 Mei 2022	Terlak sana
4. Monitoring dan Evaluasi			
a. Menyusun kuesioner untuk mengetahui tingkat ketercapaian implementasi SIPAKUM	30 Mei 2022	30 Mei 2022	Terlak sana

Tahapan Kegiatan	Milestone	Implementasi	Ket
b. Pembagian Pengisian kuesioner oleh responden untuk mengetahui tingkat ketercapaian implementasi SIPAKUM			
c. Mengolah hasil kuesioner tingkat ketercapaian implementasi SIPAKUM	31 Mei 2022	31 Mei 2022	Terlak sana
d. Masa waktu perbaikan atas saran dan masukan Quisioner.			
e. Melakukan konsultasi dengan Coach terkait Draft Laporan Aksi Perubahan (LAP).	2 Juni 2022	2 Juni 2022	Terlak sana
f. Melakukan konsultasi dengan Atasan langsung terkait Finalisasi Draft Laporan Aksi Perubahan (LAP)			
g. Menyusun Laporan Aksi Perubahan (LAP)	3 s/d 9 Juni 2022	3 s/d 9 Juni 2022	Terlak sana
h. Persetujuan Pelaksanaan Laporan Aksi Perubahan oleh Mentor	10 juni 2022	10 juni 2022	Terlak sana
B. Tahap Pasca Pelatihan	Dilaksanakan selesai pelatihan sampai satu tahun yang akan datang		
Melakukan pengembangan terhadap aplikasi SIPAKUM agar lebih menjangkau seluruh wilayah Polda Sumatera Utara			

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan-tahapan aksi perubahan yang dilaksanakan oleh action leader tidak mengalami perubahan karena seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan, sehingga pelaksanaannya berjalan

dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian tahapan aksi perubahan ini terlaksana dengan baik berkat dukungan penuh dan kerjasama dari Sponsor, Mentor, tim efektif, dan para *stakeholder* yang memberikan waktu, saran/masukan dalam membantu tercapainya aksi perubahan ini.

Proses pelaksanaan seluruh rangkaian aksi perubahan ini berjalan dengan efektif dan efisien yang menghasilkan sebuah inovasi yang sangat bermanfaat bagi satker Bidkum Polda Sumut, yaitu sistem informasi pelaporan kegiatan Bidkum (SIPAKUM) yang berbasis web/blogspot yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik sehingga dapat menciptakan produktivitas kinerja secara efektif dan efisien.

b. Pencapaian Hasil Aksi Perubahan.

Hasil capaian aksi perubahan yang dilaksanakan oleh *action leader* sebagai peserta PKA TA. 2022 dapat tercapai hingga 100 % dan sudah sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3.4. Capaian hasil aksi perubahan

NO	KEGIATAN	TAHAPAN	CAPAIAN
1	Planning (perencanaan)	Pelaporan kepada Kasatker (Sponsor), Mentor pimpinan unit kerja, untuk membahas tujuan yang hendak dicapai dalam aksi perubahan serta, melakukan Koordinasi dan Konsultasi para Stakeholder tentang rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan sekaligus untuk mendapat dukungan dari para stakeholder.	100 %

NO	KEGIATAN	TAHAPAN	CAPAIAN
2	Organizing (pengorganisasian)	Pembentukan Tim Efektif serta pembagian tugas dalam pelaksanaan dan pengembangan rencana aksi perubahan agar dapat terwujud sesuai target yang telah ditetapkan serta koordinasi dengan Tim IT terkait dengan pembuatan aplikasi SIPAKUM	100 %
3	Actuating (Pelaksanaan)	Mengarahkan seluruh sumber daya untuk mewujudkan aksi perubahan dan mengimplementasikan aksi perubahan berupa Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Bidkum (SIPAKUM) dengan melakukan sosialisasi dan bimtek. Pengesahan buku panduan pengoperasian aplikasi oleh Kasatker sebagai dasar legalitas implementasi SIPAKUM	100 %
4	Controlling (Monitoring dan evaluasi)	Memastikan bahwa seluruh kegiatan aksi perubahan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan melengkapi seluruh administrasi dalam membuat laporan akhir	100 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil capaian aksi perubahan dapat terlaksana dengan baik secara efektif dan efisien, hal ini karena *action leader* dalam mewujudkan aksi perubahan mendapat dukungan penuh dari Sponsor, Mentor, Tim efektif dan para *stakeholder*. Dukungan yang diberikan sangat membantu dalam menyelesaikan aksi perubahan sehingga inovasi yang dibuat dapat diselesaikan dengan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kinerja satker Bidkum Polda Sumut.

Para *stakeholder* dalam mendukung implementasi aplikasi SIPAKUM ini selalu memberikan informasi dan melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Bidkum

Polda Sumut, sehingga sistem pelaporan yang berbasis web/blogspot yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan publik pada satker Bidkum Polda Sumut.

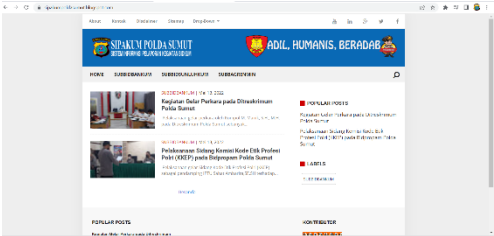
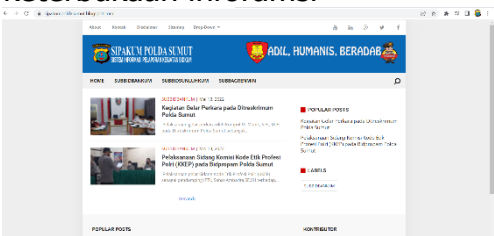

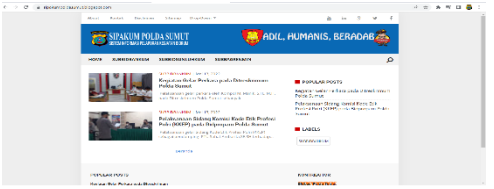
Adapun gambaran sistem pelaporan kegiatan satker Bidkum Polda Sumut sebelum dan sesudah adanya inovasi aplikasi berbasis web/blogspot melalui aplikasi SIPAKUM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

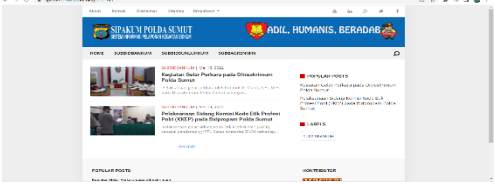
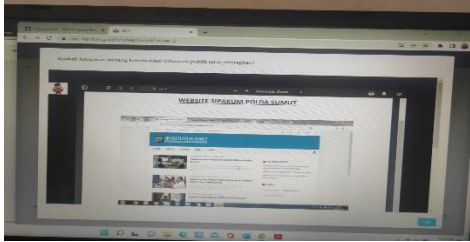
Tabel 3.5. Capaian aksi perubahan sebelum dan sesudah terbentuknya inovasi SIPAKUM

NO	SEBELUM	SESUDAH
1	Belum adanya sistem pelaporan kegiatan pada masing-masing satuan fungsi pada Bidkum Polda Sumut	Sistem Pelaporan kegiatan pada Bidkum Polda Sumut menjadi efektif dan efisien setelah adanya aplikasi SIPAKUM
2	Belum terlaksananya keterbukaan informasi publik pada masing-masing satuan fungsi pada Bidkum Polda Sumut	Terciptanya transparansi informasi dan pelayanan publik terhadap pelaporan kegiatan Bidkum Polda Sumut setelah terwujudnya aplikasi SIPAKUM
3	Proses pelaporan Kegiatan masih bersifat manual melalui group WA	Pelaporan kegiatan secara keseluruhan dapat dilakukan melalui aplikasi SIPAKUM
4	Belum pahamnya personel Bidkum Polda Sumut pentingnya dalam pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum	Setelah adanya aplikasi SIPAKUM seluruh personel Bidkum dapat mengerti betapa pentingnya pemanfaatan teknologi informasi terkait transparansi informasi guna meningkatkan kinerja dan pelayanan Publik satker Bidkum Polda Sumut

NO	SEBELUM	SESUDAH
5	Belum adanya inovasi sistem pelayanan publik pada Satker Bidkum Polda Sumut menuju Zona Integritas	Terbentuknya Inovasi aplikasi SIPAKUM sehingga satker Bidkum dapat predikat menuju Zona Integritas.

Tabel 3.6. Bentuk capaian aksi perubahan sebelum dan sesudah terbentuknya inovasi SIPAKUM

NO	SEBELUM	SESUDAH
1	Belum adanya sistem pelaporan kegiatan pada masing-masing satuan fungsi pada Bidkum Polda Sumut	Terciptanya Sistem Pelaporan Kegiatan Bidkum (SIPAKUM) pada Bidkum Polda Sumut 
2	Belum terlaksananya keterbukaan informasi publik pada masing-masing satuan fungsi pada Bidkum Polda Sumut	Terciptanya Sistem Pelaporan Kegiatan Bidkum (SIPAKUM) pada Bidkum Polda Sumut guna keterbukaan informasi 
3	Proses pelaporan Kegiatan masih bersifat manual melalui group WA 	Terciptanya Sistem Pelaporan Kegiatan Bidkum (SIPAKUM) pada Bidkum Polda Sumut secara efektif dan efisien 

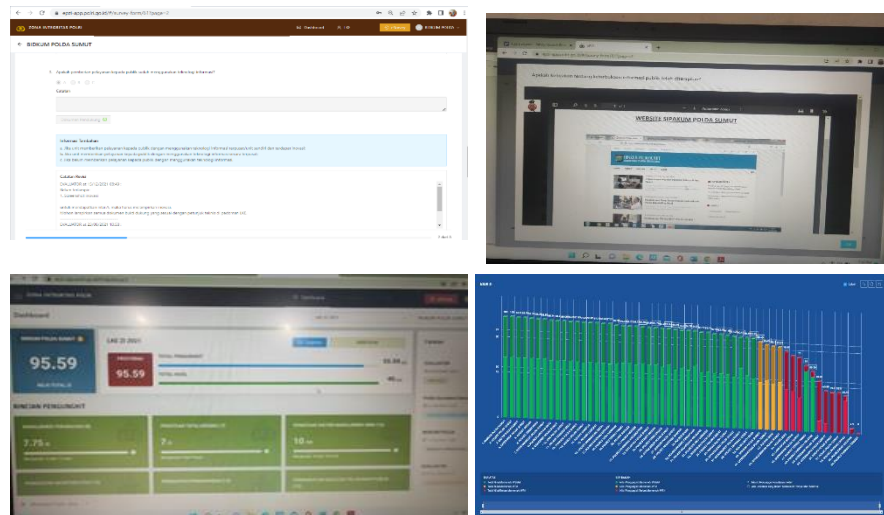
NO	SEBELUM	SESUDAH
4	Belum pahamnya personel Bidkum Polda Sumut pentingnya dalam pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kinerja Satker Bidkum	Pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan Publik Satker Bidkum Polda Sumut 
5	Belum adanya inovasi sistem pelayanan publik pada Satker Bidkum Polda Sumut menuju Zona Integritas	Inovasi sistem pelayanan publik pada Satker Bidkum Polda Sumut menuju Zona Integritas 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sesudah adanya inovasi aplikasi SIPAKUM yang dibuat oleh *action leader*, maka hasilnya sangat bermanfaat bagi organisasi. Dimana yang sebelum adanya sistem pelaporan kegiatan yang terlaksana pada Bidkum Polda Sumut, sejak terwujudnya aplikasi SIPAKUM maka sistem pelaporannya menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem pelaporan kegiatan Bidkum yang biasanya hanya melalui via WA, hal ini membuat sistem pelaporan tidak efektif dan efisien dimana pelaporannya tidak terkompulir secara sistematis yang mengakibatkan pelaporannya tidak efektif. Dengan adanya inovasi sistem pelaporan kegiatan yang berbasis web/blogspot maka pelaporan kegiatan dapat terkompulir secara keseluruhan dan terlaksana dengan efektif dan menciptakan

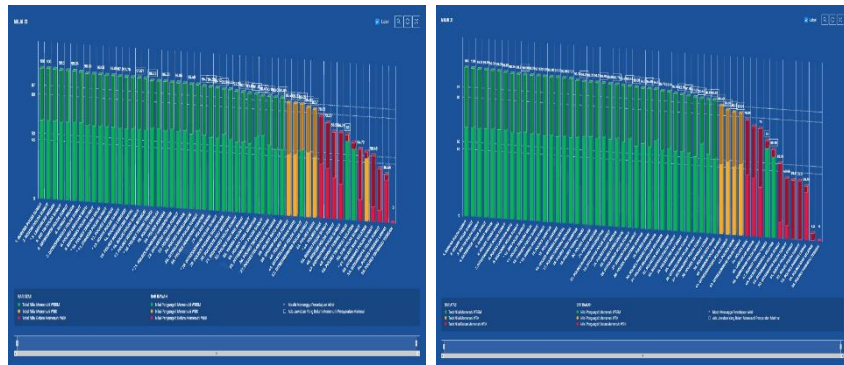
transparansi informasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pada satker Bidkum Polda Sumut.

Aplikasi SIPAKUM ini juga menjadi salah satu indikator pencapaian menuju zona integritas pada Bidkum Polda Sumut. Dimana salah satu indikator pada tata laksana zona integritas yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam peingkatkan kinerja dan pelayanan publik. Sebelumnya pada inikator ini inovasi pada Bidkum Polda Sumut belum ada terlaksana sama sekali yang mengakibatkan satker Bidkum Polda Sumut tidak memperoleh penilaian. Adapun penilaian zona integritas pada Bidkum Polda Sumut sebelum adanya inovasi aplikasi SIPAKUM berada dalam zona merah dengan nilai 66,5. Sejak terwujudnya aplikasi SIPAKUM yang berbasis web/blogspot, maka pada indikator pada zona integritas Bidkum Polda Sumut di indikator tata laksana yaitu pemanfaatan teknologi informasi mendapat nilai dan telah disetujui oleh Mabes Polri dengan nilai 95,09. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.3. Inovasi pada Indikator Tata Laksana Zona Integritas Bidkum Polda Sumut

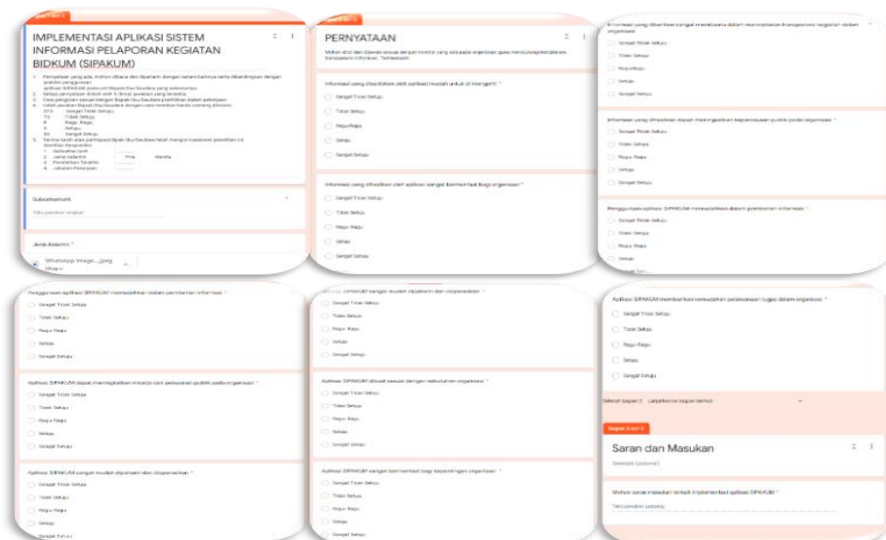


Gambar 3.4. Penilaian Zona Integritas pada Indikator Tata Laksana Bidkum Polda Sumut



Dalam rangka monitoring dan evaluasi aksi perubahan serta melihat kebermanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan (SIPAKUM) ini, *Action Leader* bersama Tim Efektif melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan cara membuat kuesioner secara online menggunakan *Google form* dengan link <https://forms.gle/pxaWP1SCnnSF1zz68> yang telah dibagikan kepada 20 responden yang terdiri dari personel Subbidbankum, Subbidsunluhkum dan Subbagrenmin Bidkum Polda Sumut yang berguna untuk mengetahui tujuan dan kemanfaatan dari aplikasi SIPAKUM pada Bidkum Polda Sumut. Adapun kuesioner yang dibuat kepada para responden terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.5 Kuesioner aplikasi SIPAKUM



Dari pembagian daftar pernyataan kuesioner kepada 20 orang responden, maka diperoleh hasil jawaban pernyataan dari para responden, dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7. Data hasil jawaban kuesioner Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan (SIPAKUM)

NO	PERNYATAAN	Jawaban Responden											
		STS		TS		R		S		SS		Rps	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Informasi yang disediakan oleh aplikasi mudah untuk di mengerti	0	0	0	0	0	0	7	35	13	65	20	100
2	Informasi yang dihasilkan oleh aplikasi sangat bermanfaat bagi organisasi	0	0	0	0	0	0	4	20	16	80	20	100
3	Informasi yang diberikan sangat membantu dalam menciptakan transparansi kegiatan dalam organisasi	0	0	0	0	0	0	3	15	17	85	20	100
4	Informasi yang dihasilkan dapat meningkatkan kepercayaan publik pada organisasi	0	0	0	0	0	0	3	15	17	85	20	100
5	Penggunaan aplikasi SIPAKUM memudahkan dalam pemberian informasi	0	0	0	0	0	0	8	40	12	60	20	100
6	Aplikasi SIPAKUM dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pada organisasi	0	0	0	0	0	0	8	40	12	60	20	100
7	Aplikasi SIPAKUM sangat mudah dipahami dan dioperasikan	0	0	0	0	0	0	6	30	14	70	20	100

NO	PERNYATAAN	Jawaban Responden											
		STS		TS		R		S		SS		Rps	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
8	Aplikasi SIPAKUM dibuat sesuai dengan kebutuhan organisasi	0	0	0	0	0	0	6	30	14	70	20	100
9	Aplikasi SIPAKUM sangat bermanfaat bagi kepentingan organisasi	0	0	0	0	0	0	6	30	14	70	20	100
10	Aplikasi SIPAKUM memberikan kemudahan pelaksanaan tugas dalam organisasi	0	0	0	0	0	0	5	25	15	75	20	100

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

Rsp : Responden

f : Frekuensi

S : Setuju

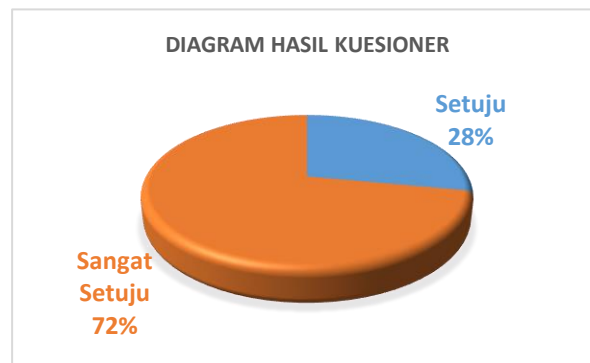
R : Ragu-ragu

SS : Sangat Setuju

Rsp : Responden

Dari data hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 20 orang responden personel Bidkum, pada umumnya para responden menjawab sangat setuju dan setuju terhadap aksi perubahan berupa Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan (SIPAKUM) yang dilaksanakan oleh *Action Leader* sebagai inovasi yang berguna dan bermanfaat bagi Satker Bidkum Polda Sumut. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner dari para responden dapat juga kita lihat bahwa responden yang menyatakan setuju sebanyak 28% dan sangat setuju 72% berarti inovasi yang dibuat oleh action leader sangat berguna dan bermanfaat guna peningkatan kinerja dan pelayanan publik pada Bidkum Polda Sumut. Hal ini dapat dilihat melalui gambar diagram di bawah ini.

Gbr. 3.5. Diagram hasil Kuisisioner



Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner tersebut di atas maka, dapat disimpulkan bahwa output dari aksi perubahan yang dilakukan oleh *action leader* berupa Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan (SIPAKUM) pada Bidkum Polda Sumut sangat bermanfaat dan berguna bagi satker Bidkum Polda Sumut guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik dan menciptakan transparansi informasi bagi umum.

BAB IV PENUTUP

A Simpulan.

Terwujudnya output aksi perubahan yang telah dilaksanakan oleh *Action Leader* berupa aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan (SIPAKUM) pada Bidkum Polda Sumut, akan menjadi tolak ukur dalam peningkatan kinerja dan pelayanan publik pada satker Bidkum Polda Sumut. Dimana informasi yang dihasilkan aplikasi SIPAKUM akan mempermudah dalam memperoleh seluruh informasi kegiatan satker Bidkum Polda Sumut. Pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi menjadi salah satu indikator yang menjadikan satker Bidkum Polda Sumut menuju Zona Integritas yang Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Aplikasi SIPAKUM ini menjadikan sistem pelaporan kegiatan pada Bidkum Polda Sumut menjadi efektif dan efisien serta menciptakan transparansi informasi. Hal ini sangat bermanfaat dalam membentuk kepercayaan publik terhadap satker Bidkum Polda Sumut. Terwujudnya aplikasi SIPAKUM ini berkat dukungan penuh dari para *stakeholder*, Sponsor, Mentor dan Tim efektif yang mau ikut membantu dan bekerjasama dalam membantu action leader dalam melaksanakan semua aksi perubahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan aksi perubahan dapat berjalan dengan baik.

Aksi perubahan yang dilaksanakan oleh *action leader* dan tim efektif dengan judul Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Bidkum (SIPAKUM) Guna Meningkatkan Kinerja Satker Bidkum Polda Sumatera Utara menjadi jawaban atas permasalahan terhadap sistem pelaporan kegiatan pada Bidkum Polda Sumut yang efektif dan efisien. Adapun kendala yang dihadapi *action leader* selama proses pelaksanaan aksi perubahan dapat diatasi dengan

menggunakan strategi metode komunikasi yang efektif dan efisien berupa komunikasi deskriptif, komunikasi persuasive dan komunikasi edukatif kepada para stakeholder di Bidkum Polda Sumut, sehingga seluruh rangkaian kegiatan aksi perubahan dapat berjalan dengan baik.

Hasil evaluasi terhadap output aksi perubahan melalui kuesioner yang dibuat oleh *action leader* ini menyatakan bahwa pembuatan aplikasi SIPAKUM ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan publik pada Bidkum Polda Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat melalui hasil responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 72% dan setuju sebanyak 18%. Dengan demikian output aksi perubahan berupa aplikasi SIPAKUM dapat diterima dengan baik oleh para *stakeholder* dan diterapkan untuk kegiatan rutin dalam sistem pelaporan kegiatan satker Bidkum Polda Sumut yang efektif dan efisien.

B Rekomendasi

1. Agar sistem informasi Pelaporan Kegiatan Bidkum (SIPAKUM) dapat diaplikasikan secara berkesinambungan dan terus menerus sehingga sistem pelaporan kegiatan dapat lebih efektif dan efisien.
2. Adanya dukungan anggaran terhadap pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIPAKUM sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi di era industri 4.0. agar tercipta sistem informasi yang lebih baik, efektif dan efisien.

Medan, 14 Juni 2022

ACTION LEADER,



ARISTO BASTIAN SIANIPAR, S.E., M.Ak.
NOSIS. 20220307021204